

ANALYSIS OF GOVERNMENT EXPENDITURE, EDUCATION, LABOR FORCE, AND DOMESTIC INVESTMENT ON ECONOMIC GROWTH IN WEST SUMATERA

ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH, PENDIDIKAN, ANGKATAN KERJA, DAN PMDN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA BARAT

Erni Febrina Harahap¹, Rezka Yoli Amanda²

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bung Hatta, Padang

Email : ernifebrinaharahap@bunghatta.ac.id rezkaamanda10@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of government spending, education, labor force, and domestic investment on economic growth in West Sumatra. The data used is secondary data in the form of time series with a period from 2013 to 2019 and a cross section of 19 districts/cities in West Sumatra Province, with documentation data collection techniques and literature studies obtained from related institutions and agencies. The variables used are government spending, education, labor force, domestic investment and economic growth. The research method used is Panel Data Regression Analysis. The results of the study show that Government Expenditure has a positive and significant on economic growth. Education has a negative and insignificant on economic growth. And Labor force has a negative but significant on economic growth. The last, domestic investment is negative and insignificant to economic growth in West Sumatra Province.

Keywords: Economic Growth, Education, Labor Force, Domestic Investment, Panel Data Regression

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia saat ini sedang melaksanakan rencana pembangunan ekonomi untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Kebijakan pemerintah ini dilaksanakan melalui otonomi daerah, pembangunan daerah menjadi strategi utama, oleh karena itu pembangunan ekonomi yang tepat akan berdampak langsung pada peningkatan produksi barang dan jasa yang akan melibatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Hidayat et al. (2011), peningkatan output berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi isu makroekonomi. Pemerintah mengutamakan pembangunan ekonomi yang berkeadilan karena bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pertumbuhan ekonomi, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi atau mendorong pertumbuhan tersebut, misalnya investasi akan menambah jumlah barang modal yang berwujud dan tidak berwujud. Pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan angkatan kerja, pengalaman kerja dan pendidikan akan meningkatkan produktivitas serta pengeluaran

pemerintah yang mempengaruhi investasi atau belanja modal untuk menghasilkan produk-produk output.

Pemerintah harus memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, yang pertama adalah nilai output total, dan yang kedua adalah jumlah penduduk yang berlokasi di wilayah teritorial dalam suatu negara. Menurut Boediono (2009) jumlah penduduk akan selalu meningkat, dan kebutuhan serta keinginan untuk mengkonsumsi barang dan jasa tidak terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut maka pemerintah harus dapat meningkatkan output barang dan jasa.

Para ekonom mendefinisikan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB), terlepas dari apakah pertumbuhan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Dari pemahaman tersebut terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu ukuran yang digunakan sebagai dasar penghitungan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan PDRB suatu daerah mencerminkan keberhasilan daerah dalam mencapai pembangunan

ekonomi di daerah tersebut. Dari uraian ini, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat; Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat; Bagaimana pengaruh angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat; dan Bagaimana pengaruh penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Kuznets berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan ahli ekonomi Klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Meskipun pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak faktor, ahli ekonomi Klasik menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh penambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung. Apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif. Maka kemakmuran masyarakat menurun kembali. Ekonomi akan mencapai tingkat perkembangan yang sangat rendah. Pada keadaan ini pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup (*subsistence*). Menurut para ahli ekonomi Klasik setiap masyarakat tidak akan mampu menghalangi terjadinya keadaan tidak berkembang tersebut.

Teori Harrod Domar

Harrod Domar dalam teorinya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan meningkat dalam jangka panjang jika pemerintah menabungkan dari sebagian pendapatan untuk mengganti dan menambah barang modal fisik yang

telah rusak atau belum tersedia dalam suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi baru seperti stok modal atau cadangan untuk tambahan neto.

Setiap tambahan cadangan neto terhadap stok modal dalam bentuk investasi baru akan menghasilkan kenaikan *output*. Dengan model pertumbuhan ekonomi, tabungan (S) merupakan jumlah dalam bagian s dari pendapatan (Y) maka $S=sY$ dan investasi (I) adalah stok modal (K), K adalah stok kapital dalam masyarakat yang berarti peningkatan kapasitas produksi masyarakat. Jadi $I= \Delta K$ [4].

Dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi dapat berada dalam posisi keseimbangan atau *steady state growth* bahwa semua variabel (investasi, output potensial, permintaan agregat, kapital, jumlah tenaga kerja) tumbuh dengan laju yang sama.

Teori Robert M Solow dan Trevor Swan

Menurut Lincoln Arsyad (2010), dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah antara lain faktor tenaga kerja. Pertumbuhan tenaga kerja dianggap sebagai salah satu faktor positif memacu pertumbuhan ekonomi, jadi meningkatnya tenaga kerja akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas dan akan memacu pertumbuhan ekonomi. Sektor pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas produksi agar terciptanya pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan,

meningkatkan fungsi perbankan dan meningkatkan fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{PPkP}{PPK1} < \frac{PkPPn}{PPK2} < \dots < \frac{PkPPn}{PPKn}$$

PPkP : Pengeluaran pemerintah per kapita;

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk, dimana 1, 2, ... n: jangka waktu (tahun)

Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organisasi yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain.

Teori Alokasi atau Reproduksi Status Sosial

Pada tahun 70-an, teori modal manusia mendapat kritik tajam. Argumen yang disampaikan adalah bahwa tingkat pendidikan tidak selalu sesuai dengan kualitas pekerjaannya, sehingga orang yang berpendidikan tinggi ataupun rendah tidak berbeda produktivitasnya dalam menangani pekerjaan yang sama. Teori ini juga menekankan bahwa dalam ekonomi modern sekarang ini, angkatan kerja yang berkeahlian tinggi tidak begitu dibutuhkan lagi karena perkembangan teknologi yang sangat cepat dan proses produksi yang semakin dapat disederhanakan. Sehingga, orang berpendidikan rendah tetapi mendapat pelatihan akan memiliki produktivitas relatif sama dengan orang berpendidikan tinggi dan formal.

Argumen ini diformalkan dalam suatu teori yang dikenal dengan teori alokasi atau persaingan status yang mendapat dukungan dari Lester Thurow (1974), John Meyer (1977) dan Randall Collins (1979). Dalam Teori alokasi ini memperlakukan pendidikan sebagai suatu lembaga sosial yang salah satu fungsinya mengalokasikan personil secara sosial menurut strata pendidikan. Keinginan mendapatkan status lebih tinggi mendorong orang untuk mengambil pendidikan lebih tinggi. Walaupun orang yang berpendidikan tinggi memiliki proporsi lebih tinggi dalam pendapatan nasional, akan tetapi peningkatan proporsi orang yang berpendidikan lebih tinggi dalam suatu bangsa tidak akan secara otomatis meningkatkan ekspansi ataupun pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan jenis data sekunder yang bersumber dari badan pusat statistik (BPS) dan lembaga-lembaga lainnya di Provinsi Sumatera Barat dengan data *time series* selama 7 tahun dan *cross*

section sebanyak 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013 hingga 2019 yang sering disebut data panel, sehingga total observasinya menjadi 133. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen seperti pengeluaran pemerintah, pendidikan, angkatan kerja dan penanaman modal dalam negeri berpengaruh terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi yang diukur dari produk domestik regional bruto atas harga kostan 2010 pada tahun 2013 hingga 2019.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pendidikan, Angkatan Kerja dan Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat dapat dilihat dari hasil print-out di Tabel 1 dengan hasil estimasi model adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_{it}$$

$$PEit = 5.918585 + 0.195735PPit - 0.002236PPDKit - 0.018246AKit - 0.007433PMDNit + \varepsilon_{it}$$

Dimana, Pengeluaran Pemerintah (X1) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Dengan nilai koefisien regresi pengeluaran pemerintah sebesar 0.195735. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 1 juta maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1957335 persen. Pendidikan (X2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.002236. Ini memperlihatkan apabila pendidikan meningkat 1 persen, maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,002236 persen. Angkatan Kerja (X3) berdampak negatif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.018246. Ini memperlihatkan apabila angkatan kerja naik 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar -0.018246 persen. PMDN (X4) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) dengan nilai koefisien -0.007433. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan PMDN sebesar 1 juta maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar -0.007433 juta.

Tabel 1
Hasil Estimasi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pendidikan, Angkatan Kerja, Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat

Sample: 2013 2019
Included observations: 7
Cross-sections included: 19
Total pool (balanced) observations: 133

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.918585	0.782721	7.561553	0.0000
PP?	0.195735	0.019592	9.990364	0.0000
PDDK?	-0.002236	0.004812	-0.464771	0.6429
AK?	-0.018246	0.008746	-2.086204	0.0389
PMDN?	-0.007433	0.031079	-0.239168	0.8114

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.244821	0.4257
Idiosyncratic random		0.284369	0.5743

Weighted Statistics			
R-squared	0.428137	Mean dependent var	2.272551
Adjusted R-squared	0.410266	S.D. dependent var	0.458594
S.E. of regression	0.352174	Sum squared resid	15.87536
F-statistic	23.95742	Durbin-Watson stat	1.208131
Prob(F-statistic)	0.000000		

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil uji t antara variabel pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa nilai probabilitas $0,000 < 0,05$. Dimana setiap peningkatan pengeluaran pemerintah maka produk domestik regional bruto akan mengalami kenaikan. Hal tersebut terjadi karena pemerintah melalui anggaran belanja daerah memprioritaskan pembiayaan untuk daerahnya di sektor produktif dan investasi modal fisik seperti perbaikan dan pembangunan baru sarana prasarana penunjang kegiatan ekonomi.

Temuan yang diperoleh pada tahapan pengujian hipotesis pertama didukung oleh teori Adolf Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Sejalan dengan penelitian Ashley Ward, (2013) dan Hasan, dkk (2011) pengeluaran pemerintah

signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi juga penelitian Sitaniapessy (2013) pengeluaran pemerintah secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap PDRB yang berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi daerah, serta Sanusi, D.(2014) bahwa semakin banyak pengeluaran pemerintah maka semakin besar pertumbuhan ekonomi dan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) pengeluaran pemerintah berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Hipotesis ini berlawanan dengan hasil pengujian, berdasarkan hasil uji t antara variabel pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa nilai probabilitas $0,643 > 0,05$. Maka dari penelitian ini disimpulkan bahwa pendidikan negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi artinya seberapa banyak orang yang menamatkan sekolah SLTA tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena perbedaan atau tidak meratanya jumlah orang yang menamatkan SLTA antar Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dan apakah ia akan berkontribusi terhadap perekonomian dengan bekerja, melanjutkan

keperguruan tinggi atau menganggur karena tidak terserap dalam lapangan pekerjaan.

Hasil penelitian ini sama dengan teori alokasi atau persaingan status yang dikemukakan pada tahun 70an dimana tingkat pendidikan tidak selalu sesuai dengan kualitas pekerjaannya, sehingga orang yang berpendidikan tinggi ataupun rendah tidak berbeda produktivitasnya dalam menangani pekerjaan yang sama. Teori ini juga menekankan bahwa dalam ekonomi modern sekarang ini, angkatan kerja yang berkeahlian tinggi tidak begitu dibutuhkan lagi karena perkembangan teknologi yang sangat cepat dan proses produksi yang dapat disederhanakan. Sehingga, orang berpendidikan rendah tetapi mendapat pelatihan akan memiliki produktivitas relatif sama dengan orang berpendidikan tinggi dan formal.

Pengaruh Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini adalah angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil uji t antara variabel angkatan kerja dengan pertumbuhan ekonomi memperlihatkan bahwa nilai probabilitas $0,039 < 0,05$, yang artinya angkatan kerja berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dimana setiap angkatan kerja naik maka pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat akan turun. Pertumbuhan penduduk semakin meningkat tidak diimbangi dengan persediaan lapangan pekerjaan serta adanya produktivitas tenaga kerja yang rendah, yang akan meningkatkan pengangguran dan secara langsung akan menurunkan pendapatan perkapita sehingga akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis ini sejalan dengan hasil pengujian teori klasik, apabila penduduk sudah terlalu banyak pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif. Maka kemakmuran masyarakat menurun, ekonomi akan mencapai tingkat perkembangan yang sangat rendah. Pada keadaan ini pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup (*subsistence*). Sejalan dengan penelitian Alisman, A. (2018) tenaga kerja berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto serta penelitian Prok (2015) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan pengaruh yang signifikan tetapi memiliki hubungan negatif terhadap PBRD. Tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja tidak

akan menambah keuntungan suatu daerah tanpa diimbangi dengan tercukupinya lapangan kerja yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan perekonomian yang dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.

Pengaruh PMDN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis keempat yang diajukan pada penelitian ini adalah penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis ini berlawanan dengan hasil pengujian, berdasarkan hasil uji t antara variabel penanaman modal dalam negeri dengan pertumbuhan ekonomi memiliki nilai probabilitas $0,811 > 0,05$. Maka dari penelitian ini disimpulkan bahwa penanaman modal dalam negeri tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi karena kebanyakan investasi yang dilakukan hanya pada industri kecil, keuntungan yang diperoleh tidak terlalu besar dan tingginya biaya yang harus dibayar oleh investor untuk berinvestasi di Provinsi Sumatera Barat. Sehingga investor asing kurang berminat untuk menanamkan modalnya di Provinsi Sumatera Barat yang membuat pertumbuhan ekonomi menurun.

Penelitian ini bertolak belakang dengan teori Harrod-Domar yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan meningkat dalam jangka panjang jika pemerintah menabungkan sebagian dari pendapatan untuk mengganti dan menambah barang modal fisik yang telah rusak atau belum tersedia dalam suatu daerah. Sejalan dengan penelitian yang ditemukan oleh Trisnu dan Purbadharmaja (2014) PMDN berdampak negatif dan tidak signifikan terhadap produk domestik regional bruto karena panjangnya prosedur yang harus ditempuh investor belum lagi biaya birokrasi yang berbelit-belit dan kurangnya keterpaduan koordinasi antar departemen yang terkait, kurang tersedianya fasilitas pendukung seperti transportasi, tenaga kerja terampil, dan teknologi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa, Variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Dimana semakin tinggi pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Barat maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Selanjutnya, variabel pendidikan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Hasil yang diperoleh menunjukkan pendidikan

bukanlah satu satunya variabel yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Variabel Angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Dimana semakin tinggi angkatan kerja di Provinsi Sumatera Barat maka pertumbuhan ekonomi akan semakin menurun. Dan variabel PMDN tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Hasil yang diperoleh memperlihatkan PMDN bukanlah satu satunya variabel yang mempengaruhi terjadi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.

Saran yang disampaikan terkait penelitian ini antara lain Pemerintah daerah bisa lebih memprioritaskan penyaluran pengeluaran pemerintah untuk sektor-sektor non fisik seperti pendidikan dan keterampilan yang akan meningkatkan kualitas modal manusia dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomia. Selanjutnya pemerintah diharapkan mampu meningkatkan PMDN melalui kebijakan-kebijakan dalam bidang ekonomi, politik maupun keamanan dalam negeri, perbaikan infrastruktur dalam menunjang perekonomian, serta mempermudah regulasi dalam berinvestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, M. dkk. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 2(4).
- Harahap, Erni Febrina, Luviana, Nurul Huda (2020). *Tinjauan Defisit Fiskal, Ekspor, Impor dan Jumlah UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Benefita, 5(2).
- Jhingan, 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Penerjemah Guritno, Raja Grafindo Persada Jakarta. ISSN. 9794211540
- Todaro, Michael P & Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. (2010). *Masalah, Kebijakan dan Politik*. Ekonomika Pembangunan. Jakarta: Erlangga.
- Arsyad, Lincolyn. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Arsyad, Lincolyn. (2010). *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Harahap, Erni Febrina. (2021). The Spatial Concentration of Manufacturing Industry Workforce: Is There a Change. *Jurnal Ipteks Terapan (Research Of Applied Science And Education)*, 15(1), 34-47
- Pambudi, E. W., & Miyasto, M. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi (Kabupaten/kota Di Provinsi Jawa Tengah}. *Diponegoro Journal of Economics*.
- Adisasmita, R. (2013). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alisman, A. (2018). Pengaruh Investasi dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh. *Jurnal Ekombis*, 2 (1).
- Hasan, E., & Amar, S. (2014). Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Riset Manajemen Bisnis dan Publik*, 1(1).
- Nugroho, S. B. M. (2016). Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 29(2).
- Muhi, Ali Hanapiah. 2010. *Analisis Investasi Modal Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Dan Pelatihan*. Jatinangor. IPDN
- Baltagi, B. H., Bresson, G., & Pirotte, A. (2008). *To Pool Or Not To Pool*. In *The Econometrics of Panel Data* (pp. 517-546). Springer, Berlin, Heidelberg.
- Hakim, A. (2014). *Pengantar Ekonometrika Dengan Aplikasi Eviews*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Nachrowi, D.N, dan Hardius U. 2008. *Penggunaan Teknik Ekonometrika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sitaniapessy, H. A. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB dan PAD. *Jurnal Economia*, 9(1).
- Sanusi, D. (2014). Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Pada

Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara Tahun 2001-2010. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2).

Sari, Mutia, dkk. (2016). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 2, November 2016

Nursini, N. (2017). Effect of Fiscal Policy And Trade Openness On Economic Growth In Indonesia:1990-2015. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(1).

Prok, K. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara Selama Periode Otonomi Daerah 2001-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(3).

Trisnu, C.I.S.R & Purbadharmaja, I.B.P. 2014. Pengaruh PMDN dan PMA Terhadap PDRB di Provinsi Bali. e-jurnal EP UNUD, Vol 3 no